INDONESIAN TREASURY REVIEW

JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Puput Waryanto
Balai Diklat Keuangan Makassar

Alamat Korespondensi: nataprojo@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
1 Desember 2016

Dinyatakan Diterima
15 Maret 2017

KATA KUNCI:
Capital Expenditure, Service Expenditure, Economic Growth.

KLASIFIKASI JEL:
H54.

ABSTRAK

The purpose of the study was to investigate the influence of capital expenditure on economic growth in Indonesia. The reasons of the study were the inconsistency of previous research results in many countries, the difficulty of achieving national economic growth target, and the low ratio of capital expenditure to Gross Domestic Product (GDP). By using time series data from 1990 to 2015 in Indonesia, this research has proved that the capital expenditure has a significant positive effect on economic growth. On the other hand, the operational expenditure, which consisted of personnel expense, goods and services expense, interest, subsidies, grants and social assistance, had not a significant effect on economic growth. This study has considered inflation as a control variable. Consequently, the central government should be able to pay attention on capital expenditure, both on its quantity and quality.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian di berbagai negara, masih sulitnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, masih rendahnya rasio belanja modal terhadap PDB. Dengan menggunakan data time series selama 26 tahun mulai 1990 s.d. 2015 di Indonesia, penelitian ini telah membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini telah mempertimbangkan variabel kontrol berupa inflasi. Berkaitan dengan hasil penelitian, pemerintah pusat hendaknya terus memperhatikan belanja modal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas belanja modal.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kendali pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi terletak pada anggaran negara yang memuat jumlah dan tujuan anggaran tersebut digunakan. Salah satu pos anggaran di dalam APBN adalah belanja modal. Belanja modal digunakan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010). Salah satu poin penting belanja modal yang berdampak langsung terhadap masyarakat adalah pengadaan infrastruktur. Infrastruktur yang menyentuh kegiatan masyarakat bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dalam waktu 3 tahun masa pemerintahan presiden terpilih (tempo.co, 2015). Hal tersebut merupakan sebuah target yang luar biasa karena lebih dari satu dasawarsa terakhir pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya berada pada kisaran 6%. Bahkan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 hanya mencapai 4,79%. Pertumbuhan ekonomi di atas 7% hanya terjadi pada masa sebelum reformasi 1998 (World Bank, 2016). Target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini didukung dengan salah satu agenda priorotas pemerintah yang tercantum pada Nawa Cita. Poin keenam Nawa Cita menyatakan bahwa pemerintah diharapkan dapat membangun infrastruktur yang dapat mendorong produktivitas masyarakat sehingga dapat mengubah Indonesia menjadi negara produktif sekaligus meningkatkan daya saing negara (KPU, 2014). Pemerintah berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing rakyat di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Agenda pembangunan infrastruktur dicanangkan karena masih lemahnya Indonesia dalam di bidang tersebut. Dalam 15 tahun terakhir, belanja infrastruktur masih sangat rendah dibandingkan negara tetangga. Pada tahun 2015, realisasi belanja modal hanya mencapai Rp 215,4 triliun. Dengan realisasi anggaran sebesar itu maka rasio belanja infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 1,87%. Meskipun angka tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih belum mendekati angka ideal (5%). *Institute for Development Economics and Finance* berasumsi bahwa rasio 5% sebagai rasio ideal karena merujuk pada negara-negara Asia lainnya, misalnya Malaysia yang memiliki rasio belanja infrastruktur terhadap PDB mencapai 7%. Tiongkok bahkan sempat pernah menyentuh angka 14%. Sementara Indonesia, dalam 15 tahun terakhir belum pernah menyentuh rasio 5%. Dengan fakta tersebut, sangat wajar apabila kondisi infrastruktur Indonesia tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data dari *World Economic Forum* 2014, Indonesia berada di peringkat 72 dalam hal infrastruktur. Sebagai perbandingan, Malaysia jauh berada di atas Indonesia yakni pada peringkat 20. (jpnn.com)

Gambar 1. Rasio belanja modal terhadap PDB
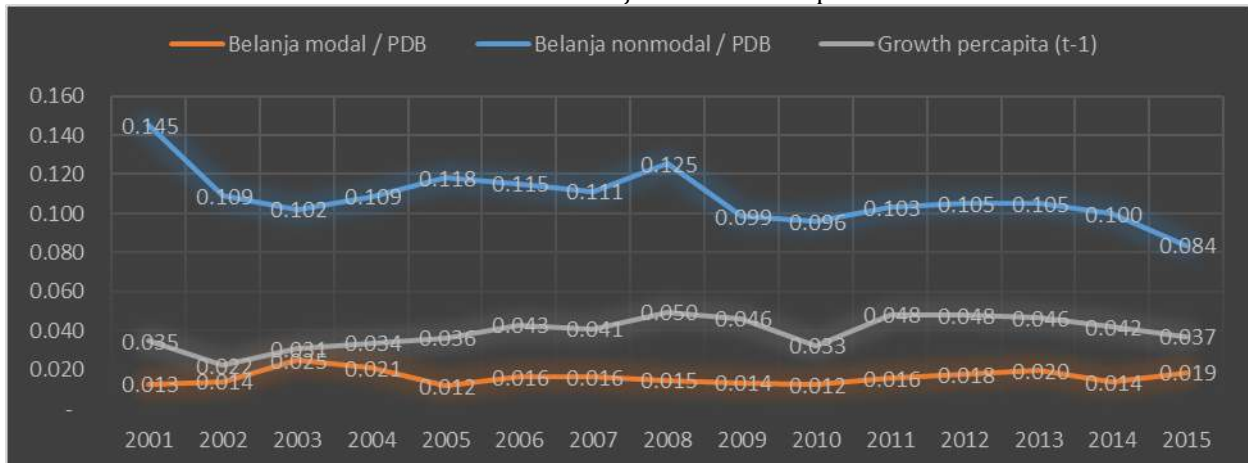
Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, 2016 (diolah).

Infrastruktur yang rendah dianggap sebagai penghambat produktivitas masarakat khususnya di kalangan pinggiran. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Pada triwulan III 2016, perekonomian Indonesia tumbuh 5,02% (BPS, 2016). Meskipun menunjukkan adanya peningkatan, tetapi angka tersebut masih jauh dari target yang akan dicapai yakni 7%. Selain itu, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah agenda pemerintah

dalam bentuk belanja infrastruktur benar-benar diperlukan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau tidak. Penelitian ini diharapkan akan membuktikan secara empiris pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagian ahli mengemukakan hasil penelitiannya bahwa belanja modal (*capital expenditure*) akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli yang lain justru berpandangan sebaliknya. Beberapa penelitian juga telah dikembangkan di Indonesia, tetapi sebagian besar masih dilakukan secara lokal dalam rangka memberikan rekomendasi kepada masing-masing daerah otonom sesuai dengan karakter dan potensi daerah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan hasil penelitian, mulai dari pengaruh belanja pemerintah secara keseluruhan hingga spesifik kepada belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa hasil penelitian tentang determinan pertumbuhan ekonomi memasukkan ukuran belanja pemerintah. Penelitian menggunakan data *cross-section* oleh Grier dan Tullock (1989) dan Barro (1991) menemukan pengaruh negatif dan signifikan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Grier dan Tullock juga menyampaikan bahwa pengaruh ini akan memberikan hasil berbeda tergantung dari kelompok negara, sekaligus menghasilkan persamaan regresi yang berbeda-beda untuk masing-masing kelompok negara.[1]

Penelitian yang lain menghasilkan temuan yang berbeda. Hansson dan Henrekson (1994) menemukan bahwa pada 14 negara OECD, belanja konsumsi pemerintah, transfer, dan total belanja, memiliki dampak negatif, sementara investasi tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.[2] Easterly dan Rebelo (1993) menemukan pengaruh positif dan signifikan dari investasi pemerintah dalam transportasi dan komunikasi, tetapi belanja lain tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.[3] Penelitian Valadkhani (1998) yang dilakukan di Iran, menemukan bahwa belanja modal pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDB, khususnya di sektor produksi barang.[4]

Schaltegger dan Torgler (2006) menemukan bahwa pada level wilayah dan lokal di negara Swiss, belanja pemerintah dari anggaran rutin memiliki pengaruh negatif, sedangkan belanja modal pemerintah tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pertumbuhan ekonomi.[5] Berkaitan dengan penelitian ini, Aschauer (1989) menemukan bahwa investasi pemerintah pada infrastruktur dasar memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 1949-1985.[6] Devarajan, Swaroop, dan Zou (1996) melakukan penelitian terhadap 43 negara berkembang, dan mereka menemukan bahwa hanya belanja pemerintah belanja rutin yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan.[7] Sebaliknya, belanja infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, tidak berpengaruh signifikan, dan bahkan negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka berkesimpulan bahwa negara-negara berkembang menghabiskan terlalu banyak anggaran untuk belanja modal dan tidak cukup dana tersedia untuk belanja rutin. Selain itu, dengan menggunakan jangka waktu penelitian 20 tahun, Bose, Haque, dan Osborn (2007) menemukan bahwa investasi pemerintah dan belanja pendidikan dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi.[8]

Pendekatan penelitian berikutnya dilakukan oleh Turnovsky dan Fisher (1995) dengan mengembangkan model teoritis untuk meneliti dampak belanja modal dan belanja konsumtif. Mereka menyimpulkan bahwa belanja modal bersifat lebih produktif daripada belanja

---

[1] Kevin B. Grier and Gordon Tullock, An empirical analysis of cross-section economic growth, 1951-1980, *Journal of Monetary Economics*, 1989.

[2] Par Hansson and Magnus Henrekson, A new framework for testing the effect of government spending on growth and productivity, *Public Choice 81*, 1994, hlm. 381-401.

[3] William Easterly and Sergio Rebelo, Fiscal policy and economic growth: An empirical Investigation, *Journal of Monetary Economics,* 1993.

[4] D. P. Doessel & A. Valadkhani, Economic Development and Institutional Factors Affecting Income Distribution: The Case of Iran, 1967-1993. *International Journal of Social Economics,* 1998, 25 (2/3/4), hlm. 410-423.

[5] Christoph A. Schaltegger and Benno Torgler, Growth Effects of Public Expenditure on the State and Local Level: Evidence From a Sample of Rich Governments. *Applied Economics,* 2006.

[6] David A. Aschauer, Is public expenditure productive?, *Journal of Monetary Economics*, 1989.

[7] Shantayanan Devarajan, *et. al.*, The composition of public expenditure and economic growth, *Journal of Monetary Economics,* 1996.

[8] Bose, *et. al.*, *Public expenditure and economic growth: A disaggregated analysis for developing countries,* (Manchester School, 2007).

konsumtif, tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa belanja konsumtif memiliki kemungkinan untuk lebih produktif dalam kondisi tertentu.[9] Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan populasi negara penelitian yang berbeda, kesimpulan penelitian juga berbeda karena perbedaan karakter, sosial, dan budaya bangsa yang diteliti. Hal ini dikuatkan oleh Butkiewic (2011) dengan menyimpulkan bahwa pada negara maju, balanja pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk negara berkembang belanja modal di bidang infrastruktur dipandang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan belanja modal untuk belanja barang.

Penelitian tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan telah dilakukan di Indonesia, misalnya oleh Adi (2006), Sularso (2011), Parnawati (2011), Anasmen (2009), dan Setyawati (2007). Penelitian Adi dan Sularso tidak secara langsung menguji pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua penelitian tersebut menggunakan lokus daerah provinsi. Adi (2006) berusaha melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (studi pada Kabupaten dan Kota se-Jawa Bali), sedangkan Sularso (2011) menggunakan aplikasi Amos untuk menguji belanja modal sebagai variabel intervening yang menghubungkan kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Parnawati (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa peningkatan belanja modal dapat meningkatkan PDRB, tetapi peningkatan PDRB tidak mempengaruhi peningkatan belanja modal. Sebaliknya, penelitian Anasmen (2009) menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa belanja modal pemerintah kota/ kabupaten tidak berpengaruh cukup besar pada pertumbuhan PDRB. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Setiyawati (2007) yang menyatakan bahwa belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian-penelitian tersebut berlaku pada lingkup daerah yang dijadikan sebagai populasi penelitian dan tidak berlaku pada tingkat nasional. Hal ini terjadi karena meskipun *rule of the game* hampir sama, tetapi budaya serta potensi daerah berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih tepat secara nasional mengenai pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan penelitian yang menguji hubungan tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan alokasi anggaran pada pos-pos yang diharapkan. Disamping itu, pengujian untuk mengetahui pengaruh belanja barang terhadap pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan mengingat adanya perbedaan hasil penelitian pada jenis belanja tersebut serta peningkatan alokasi belanja barang yang tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini memberikan perbandingan pengaruh antara belanja modal dan belanja operasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan apakah belanja modal benar-benar memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan seberapa besar kekuatan pengaruhnya dibandngkan dengan pengaruh belanja operasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini selanjutnya akan digunakan untuk membuat rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.

Penelitian pada paper ini juga mempertimbangkan hasil penelitian Barro (1996) yang menemukan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk menghindari adanya hasil penelitian yang bias, variabel inflasi dimasukkan ke dalam model estimasi sebagai variabel kontrol. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak mengabaikan faktor penting.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi terbaik atas tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi dengan melihat aspek belanja modal. Penelitian ini juga menggunakan belanja operasi sebagai variabel bebas sehingga pengaruh variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diperbandingkan antara belanja modal dan belanja operasi. Pengaruh yang diuji meliputi pengaruh secara bersama-sama dan parsial.

---

[9] Stephen J. Turnovsky and Walter H. Fisher, The Composition of Government Expenditures and Its Consequences for Macroeconomic Performance, *Journal of Economic Dynamics and Control,* 1995.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Klasifikasi Belanja

Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa belanja negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (dana transfer). Pengeluaran dalam bentuk belanja untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Khusus untuk keperluan pengendalian manajemen, klasifikasi yang mudah untuk dilakukan adalah klasifikasi menurut ekonomi atau jenis belanja, yaitu: 1) Belanja Operasi: terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial; 2) Belanja Modal: terdiri dari belanja tanah belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya; 3) Belanja Lain-lain/ Tidak Terduga; 4) Transfer (Buletin Teknis SAP 4, 2006).

Pada penelitian ini, belanja operasi dan belanja modal sebagai variabel penelitian. Beberapa peneliti yang mengkaji pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi membedakan pengaruh kedua jenis belanja tersebut antara lain Henrekson (1994), Easterly dan Rebelo (1993), Valadkhani (1998), Schaltegger dan Torgler (2006), Aschauer (1989), Devarajan, Swaroop, dan Zou (1996), Bose, Haque, dan Osborn (2007), Turnovsky dan Fisher (1995), dan Attari (2013).

2.1.2. Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rincian lebih lanjut mengenai belanja modal diuraikan dalam Buletin Teknis 03: Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/ karakteristik sebagai berikut: 1) berwujud, 2) akan menambah aset pemerintah, 3) mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, 4) nilainya relatif material.

Sedangkan ciri-ciri/ karakteristik Aset Lainnya adalah: 1) tidak berwujud, 2) akan menambah aset pemerintah, 3) mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, 4) nilainya relatif material. Berdasarkan ciri-ciri/ karakterisitik tersebut, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi 19 suatu aset tetap atau aset lainnya (*treshold capitalization*), sehingga pejabat/ aparat penyusun anggaran dan/atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik pada waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika: a) pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah; b) pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; c) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja modal berkaitan erat dengan istilah investasi. Halim (2008) menyatakan bahwa kata investasi dapat berarti bermacam-macam, tergantung dari konteks mengartikannya. Dalam bahasa akuntansi pada konteks belanja, investasi dapat timbul dari adanya perbedaan antara *revenue expenditure* dan *capital expenditure*. Dalam membahas belanja modal, maka istilah yang digunakan adalah *capital expenditure* karena memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Sularso dan Restianto, 2011).[10]

Dijelaskan lebih lanjut di dalam buletin teknis 04, perolehan Belanja Modal meliputi: belanja modal untuk perolehan tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBN/APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional. Nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut harus tetap diperhatikan.

Seperti pada akuntansi komersial sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan

---

[10] H. Sularso & Y. E. Restianto, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah,* Media Riset Akuntansi, 2012, 1(2).

(PSAK), akuntansi belanja modal pada Standar Akuntansi Publik (SAP) juga mengenal adanya pengeluaran setelah perolehan. Di samping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki, dan 2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/ aset lainnya.

Nilai kapitalisasi aset tetap yang dianggap sebagai belanja modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) bahwa Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi, meliputi: a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Lampiran II.08 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf disebutkan bahwa pengeluaran yang dapat di kapitalisasi merupakan “Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan”.
3. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal pada Lampiran I huruf E angka 4 disebutkan bahwa “Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan/atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjalasan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan”.

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Boediono (2010:28) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perluasan kegiatan ekonomi dan menjadi satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.[11] Sementara itu, menurut Sukirno (1996, 33), pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tinggi pertumbuhan ekonomi maka makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yang harus diperhatikan yaitu distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur; peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; pembangunan fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal; penyediaan perumahan dengan biaya rendah; restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian (Saad, 2009).

Proses pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat (BPS, 2008:1) di dalam Arwati dan Hadiati (2013). Indikator makro seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja perekonomian. PDRB merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan (BPS, 2008:5). PDRB perkapita adalah hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (BPS, 2008:8).

2.1.4. Inflasi

Menurut Bank Indonesia (2015) inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja

---

[11] Boediono, *Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai Ekonomi, Edisi Ketiga*, (Jakarta: KPG (Keputakaaan Populer Gramedia), 2010) hlm. 28.

tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Samuelson dan Nordhaus (2004) mendefinisikan inflasi dengan cukup sederhana yaitu kenaikan tingkat harga umum.[12]

Inflasi didefinisikan oleh Ackley dalam Iswardono (1997) sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat).[13] Menurut definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi. Dari definisi tersebut, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi menurut Manurung (2004), yaitu:

a. Kenaikan harga, dimana harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya;

b. Bersifat umum, dimana kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik;

c. Berlangsung terus-menerus, dimana kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat.

Perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan untuk mengetahui apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus menerus. Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulanan dan tahunan. Secara ekonomi, perubahan harga dapat disebabkan oleh jumlah penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Inflasi dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) terjadi karena kenaikan permintaan total (*agregat demand*) yang berlebihan sementara produksi (*supply*) telah berada pada keadaan kesempatan kerja yang penuh dan tidak mungkin meningkat lagi sehingga penambahan permintaan hanya akan menyebabkan terjadinya perubahan peningkatan harga. Inflasi karena desakan biaya (*cost push inflation*) terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (*input*) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (*output*) yang dihasilkan ikut naik. Biaya per unit yang lebih tinggi untuk produksi menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Kenaikan harga secara umum pada beberapa barang tertentu secara kontinu disebut inflasi tertutup (*closed inflation*). Sedangkan kenaikan harga barang secara keseluruhan disebut inflasi terbuka (*open inflation*). Inflasi yang tidak terkendali (*hiperinflasi*) adalah kondisi dimana inflasi terjadi secara hebat dan harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali.

Barro (1996) telah menguji keterkaitan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data dari sekitar 100 negara dengan rentang waktu 1960-1990.[14] Jika sejumlah karakteristik negara tetap konstan, maka hasil regresi menunjukkan bahwa efek dampak dari kenaikan inflasi rata-rata sebesar 10% per tahun adalah penurunan tingkat pertumbuhan riil PDB per kapita 0,2-0,3% per tahun dan penurunan rasio investasi terhadap PDB sebesar 0,4-0,6%. Meskipun pengaruh negatif dari inflasi terhadap pertumbuhan terlihat kecil, akan tetapi memiliki efek jangka panjang yang cukup besar, misalnya, pergeseran kebijakan moneter yang menaikkan tingkat inflasi rata-rata jangka panjang sebesar 10% per tahun diperkirakan menurunkan tingkat GDP riil setelah 30 tahun sebesar 4-7%. Oleh karena itu, dalam menguji pengaruh variabel belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu mempertimbangkan variabel inflasi sebagai variabel kontrol yang mengendalikan pengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi perkapita.

2.2. Penelitian Terdahulu

Priyo Hari Adi (2006) melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah. Penelitian tersebut dilakukan pada kabupaten dan kota se-Jawa Bali dengan menggunakan data APBD realisasi dari tahun 1998-2003 yang dikelompokkan menjadi data sebelum dan data sesudah pelaksanaan desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, dan belanja pembangunan memberikan dampak positif terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi.

Hafidz Sularso (2011) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah.

---

[12] P. A. Samuelson dan Nordhaus WD, *Ilmu Makroekonomi. Edisi Tujuh Belas,* Terj. Gretta, Theresa Tanoto, Bosco Carvallo, dan Anna Elly, (Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2004).

[13] Iswardono, Kebijakan Moneter di Indonesia (Indonesian Monetary Policy), *Journal of Economics*, FE UII, 1997, Vol. 3, No. 2.

[14] R. J. Barro, *Inflation and Growth*. Review, 78, 1996.

Hasil penelitian Valadkhani (1998) yang dilakukan di Iran menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDB, khususnya di sektor produksi barang. Penelitian di negara-negara OECD memberikan bukti empiris bahwa terjadi korelasi positif struktural antara belanja publik dengan PDB per kapita (Lamartina, 2008).

Schaltegger dan Torgler (2006) meneliti hubungan antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini berkonsentrasi pada hubungan antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan sampel pemerintah pusat dan pemerintah daerah di negara Swiss selama periode 1981-2001. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif yang cukup kuat antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Belanja publik dari anggaran operasional tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi apabila dibandingkan dengan pengeluaran dari anggaran modal.

Bose, *et al.* (2007: 533) meneliti dampak pertumbuhan ekonomi dari belanja pemerintah dengen menggunakan data panel 30 negara berkembang tahun 1970-an s.d 1980-an, yang berfokus pada belanja pemerintah secara terpisah. Penelitian ini mengembangkan metode penelitian sebelumnya dengan mengakui secara eksplisit peranan dari keterbatasan anggaran dan bias yang mungkin berasal dari variabel yang dihilangkan. Penelitian ini menghasilan dua kesimpulan utama: pertama, belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi belanja langsung tidaklah signifikan; kedua, pada tingkatan terpisah, investasi pemerintah dalam pendidikan dan total belanja pendidikan adalah dua pengeluaran yang secara signifikan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi bahkan ketika keterbatasan anggaran dan vaiabel yang dihilangkan telah dipertimbangkan.

Devarajan, *et al.* (1996) dengan menggunakan data dari 43 negara-negara berkembang dan lebih dari 20 tahun melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran saat ini memiliki efek pertumbuhan yang positif dan signifikan secara statistik. Sebaliknya, hubungan antara komponen belanja modal publik dan pertumbuhan per-kapita adalah negatif. Dengan demikian, pengeluaran yang tampaknya produktif, bila digunakan secara berlebihan bisa menjadi tidak produktif. Hasil ini menyiratkan bahwa pemerintah negara berkembang telah *misallocating* pengeluaran publik yang mendukung belanja modal dengan mengorbankan pengeluaran saat ini.

Pertanyaan mengenai apakah pengeluaran pemerintah memiliki efek positif atau negatif pada pertumbuhan ekonomi kembali diteliti oleh Hansson dan Henrekson (1994). Dalam penelitian tersebut disarankan menggunakan metode baru untuk menguji efek dari berbagai jenis pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan produktivitas di sektor swasta. Fokus pada produktivitas di sektor swasta dan penggunaan data terpilah memungkinkan untuk menghindari atau mengurangi sejumlah masalah metodologis. Kesimpulan utama yang cukup kuat dari penelitian tersebut adalah transfer pemerintah, konsumsi dan pengeluaran total memiliki efek konsisten negatif, sementara investasi pemerintah tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Easterly dan Rebelo (1993) berusaha menjelaskan keterkaitan antara variabel kebijakan fiskal, tingkat perkembangan, dan tingkat pertumbuhan. Dalam salah satu kesimpulan penelitiannya, mereka mengungkapkan bahwa investasi dalam transportasi dan komunikasi secara konsisten berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Turnovsky dan Fisher (1995) mengembangkan model teoritis untuk meneliti dampak belanja modal dan belanja konsumtif yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa belanja modal bersifat lebih produktif daripada belanja konsumtif, tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa belanja konsumtif boleh jadi lebih produktif dalam kondisi tertentu.

Seperti pada penelitian-penelitian yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini juga memisahkan belanja modal dan belanja operasi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokus, subjek penelitian, dan penggunaan variabel kontrol yang diduga turut mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini dilakukan para taraf nasional dimana penelitian sebelumnya hanya pada tingkat regional.

2.3. Pengembangan Hipotesis

H10. Belanja modal dan belanja operasi tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi.

H1A. Belanja modal dan belanja operasi tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi.

H20. Belanja modal dan belanja operasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

H2A. Belanja modal dan belanja operasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan konfirmasi dan melakukan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh belanja modal teradap pertumbuhan ekonomi. Menurut Sugiyono (2014), dalam penelitian dikenal adanya subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian mengacu kepada tempat, sedangkan objek penelitian mengacu kepada variabel penelitian. Dengan demikian, subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah pusat Indonesia sedangkan objek penelitian terdiri dari belanja modal, belanja operasional, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 1990-2014.

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sekaran (2003, 265), populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau barang yang menjadi perhatian dan akan digali datanya oleh peneliti.[15] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja pemerintah pusat di Indonesia tahun 1990-2014. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *saturation sampling*, yaitu metode pemilihan sampel dengan mengambil semua anggota populasi.

3.2. Tipe Riset

Riset ini dapat diklasifikasikan sebagi riset deskriptif, kausal, dan kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Creswell (2003:18) menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe riset yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran.[16]

> *A quantitative approach is one in which the investigator primarily uses postpositivist claims for developing knowledge (i.e., cause and effect thinking, reduction to specific variables and hypotheses and questions, use of measurement and observation, and the test of theories), employs strategies of inquiry such as experiments and surveys, and collects data on predetermined instruments that yield statistical data.*

3.3. Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Peneliti tidak menggali data langsung dari subjek penelitian melalui survei. Sekaran (2003: 222) menjelasan bahwa data sekunder dapat digali secara internal ataupun eksternal organisasi dan dapat diakses dari internet atau publikasi informasi.[17] Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Data mengenai belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai, dan total belanja diperoleh dari Kementerian Keuangan. Data mengenai inflasi dan Pertumbuhan PDB Perkapita diperoleh dari BPS dan Worldbank.

Untuk menggali data, peneliti menggunakan studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan memproses data, artikel, dan jurnal dan tulisan lainnya sesuai dengan topik permasalahan. Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian. Beberapa data mentah yang diperoleh perlu pegolahan lebih lanjut agar dapat diolah menjadi variabel, dengan perhitungan sesuai dengan operasionalisasi variabel.

3.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri atas variabel terikat, bebas, dan kontrol. Hubungan terhadap variabel dependent telah didukung oleh penelitian terdahulu. Variabel terikat dalam peneliian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Beberapa peneliti seperti Devarajan (1996), Butkiewicz (2011), dan Landau (1983) menggunakan indikator PDB perkapita sebagai dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi, atau mereka melihat indikator pertumbuhan pada setiap individu rata-rata di negara yang diteliti. Sedangkan Attari (2013), Sularso (2011), Parnawati (2010), Putra, dan Setyawati (2007) menggunakan indikator PDB (pusat) dan PDRB (daerah). Dalam menghitung besarnya variabel, Attari (2013) secara rinci lebih menuliskannya dalam bentuk logaritma natural dari PDB Riil.

Pertumbuhan Ekonomi = Log Natural dari PDB Riil = LnGrowth

Belanja modal dan belanja operasi digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Pembedaan kedua jenis belanja ke dalam belanja modal dan belanja operasi dilakukan oleh beberapa penelitian dengan berbagai nama yang berbeda (Henrekson (1994), Easterly dan Rebelo (1993), Valadkhani (1998), Schaltegger dan Torgler (2006), Aschauer (1989), Devarajan, Swaroop, dan Zou (1996), Bose, Haque, dan Osborn (2007), Turnovsky dan Fisher (1995), dan Attari (2013). Attari (2013) secara rinci menunjukkan operasional variabel belanja modal dan belanja operasi dalam bentuk logaritma natural atas variabel tersebut. Sedangkan rincian angka riil yang dimasukkan sebagai variabel didasarkan atas Buletin Teknis 04 SAP. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi,

---

[15] Uma Sekaran, *Research Method for Business*, Fourth Edition, (USA: John Wiley and Sons, Inc., 2003) hlm. 265.

[16] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* - 2nd Ed, (India: Sage Publication, 2003) hlm. 18.

[17] Sekaran, *Op. Cit.*, hlm. 222.

hibah, dan bantuan sosial; sedangkan Belanja Modal terdiri dari belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; dan belanja aset tetap lainnya.

Belanja Modal = LnModal = Ln (belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; dan belanja aset tetap lainnya)

Belanja Operasi = LnOperasi = Ln (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial)

Inflasi merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini. Barro (1996) telah menguji keterkaitan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan data dari sekitar 100 negara dengan rentang waktu antara tahun 1960 sampai dengan 1990. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi. Oleh Karena itu, dengan memasukan inflasi sebagai variabel control dapat mengurangi dampak inflasi dalam estimasi model pengaruh belanja modal dan belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Inflasi = Log Natural Inflasi = LnInf

Dengan demikian, model penelitian ini adalah:

LnPDB = a + b1 LnModal + b2 LnOperasi + b3 LnInf + e

Memasukkan variabel kontrol ke dalam persamaan regresi bertujuan untuk mengakomodir adanya variabel yang diduga juga berpengaruh terhadap estimasi model. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhaliwal, dkk. (2015) yang menguji pengaruh inflasi terhadap beban pajak secara ekonomi dengan menggunakan intensitas aset tetap dan intensitas persediaan sebagai variabel pemoderasi. Demikian pula Richardson, *et al.* (2015) yang menggunakan variabel kontrol dan memasukkannya ke dalam model regresi sebagaimana halnya diperlakukan seperti variabel independen dalam meneliti pengaruh *financial distress* terhadap *corporate tax avoidance* dengan sampel perusahaan publik di Australia melalui persamaan:

*CTAit = α0it + β1ALTMANit + β2GSDit + β3GSD*ALTMANit + β4FAGEit + β5SIZEit + β6LEVit + β7CINTit + β8INVINTit + εit*

Komponen *[β4FAGEit + β5SIZEit + β6LEVit + β7CINTit + β8INVINTit + εit]* merupakan komponen variabel kontrol.

Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai variabel yang diambil dalam penelitian ini, operasionalisasi variabel disajikan dalam ringkasan variable berikut ini.

Tabel 1. Ringkasan Variabel

Jenis Variabel	Nama	Translasi ke dalam Logaritma Natural (Penyimbolan dalam Aplikasi dan Persamaan Regresi)
Terikat	Pertumbuhan ekonomi	LnGDP
Bebas	Belanja Modal	LnModal
	Belanja Operasi	LnOperasi
Kontrol	Inflasi	LnInflasi

Sumber: diolah berbagai sumber

3.5. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas dan heterokedastisitas. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengujian linier berganda perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu (Ghozali, 2013), yaitu:

3.5.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05, maka data residual terdistribusi secara normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05, maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2013).

3.5.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel bebas dalam model regresi (Ghozali, 2013). Uji multikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas (tidak terjadi korelasi antar variabel independen). Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana, setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance*

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* <0.10 atau sama dengan nilai VIF>10 (Ghozali, 2013).

3.5.3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda linier memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan menjadi tidak layak untuk dipakai. Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson.*

Menurut Ghozali (2013), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW test). Tidak ada autokorelasi jika nilai *Durbin-Watson* adalah sama atau lebih besar dari batas atas dan sama atau lebih rendah dari nilai empat dikurangi batas atas (dU ≤ DW ≤ 4-dU). Hal ini tidak bisa disimpulkan jika dL ≤ DW ≤ dU, atau 4-dU ≤ DW ≤ 4-dL. Ada autokorelasi positif jika 0 <DW <dL atau autokorelasi negatif jika 4-dL <DW <4.

3.5.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain atau tidak. Jika varian dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas maka digunakan uji Glejser, yaitu dengan menguji tingkat signifikansi. Pengujian ini dilakukan dengan merespon variabel (x) sebagai variabel independen dengan nilai absolut *unstandardized* residual regresi sebagai variabel dependen. Apabila hasil uji di atas level signifikan (p > 0,05), maka tidak terdapat heterokedastisitas.

Untuk membuktikan kebenaran adanya pengaruh variabel independen dan dependen digunakan analisis regresi.
Rumusan yang digunakan sebagai berikut:

$$LnPDB = a + b1\ LnModal + b2\ LnOperasi + b3\ LnInf + e$$

Dimana:
LnPDB = logaritma natural atas Pertumbuhan PDB Riil.
a = konstanta
LnModal = logaritma natural atas belaknja modal
LnOperasi = logaritma natural atas belanja operasi
E = *error* term
b1-3 = koefisien regresi

3.6. Metode Analisis Data

3.6.1. Regresi

Regresi digunakan untuk menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Widarjono, 2008: 17). Persamaan regresi populasi hanya dapat diestimasi dengan menggunakan data sampel (Widarjono 2008 19). Tantangan dalam membuat garis regresi sampel adalah bagaimana kita bisa mendapatkan garis regresi yang baik. Garis regresi sampel yang baik terjadi apabila nilai prediksi berada sedekat mungkin dengan data aktualnya.

Perhitungan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi berganda dengan menggunakan Aplikasi SPSS 23. Regresi linear digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variable X dan Y, yang diukur dengan menggunakan koefisien regresi. Metode ini menghubungkan variabel dependen dengan variabel independen.

3.6.2. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Namun variabel bebas yang melebihi dua, maka nilai R2 yang dipakai adalah nilai Adjusted R2.
KD = R2 x 100%
Keterangan :
KD = Koefisien determinasi
R2 = Adjusted R2

3.6.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat atau tidak. Pengambilan keputusan ditolak dan diterimanya hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut:

1) Jika F hitung > F tabel atau nilai Sig. < 0,05, maka Ha diterima (ada pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat).
2) Jika F hitung < F tabel atau nilai Sig. > 0,05, maka Ha ditolak (tidak ada pengaruh secara

parsial variabel bebas terhadap variabel terikat).

Penentuan F tabel uji signifikansi 5%: a) Menentukan nilai df1 = k-1, dimana k adalah jumlah seluruh variabel Menentukan df2 = N-k, dimana N adalah jumlah sampel; b) Setelah diketahui nilai df1 dan df2 maka dikonsultasikan dengan F tabel yang ada pada lampiran buku-buku statistik. Contoh df1 = 2 dan df2 = 50 maka F(2;50) = 3,1826.

3.6.4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/ bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan ditolak dan diterimanya hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut:

1) Jika t hitung > t tabel atau nilai Sig. < 0,05, maka Ha diterima (ada pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat)

2) Jika t hitung < t tabel atau nilai Sig. < 0,05, maka Ha ditolak (tidak ada pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat)

Penentuan t tabel dua sisi uji signifikansi 5%:

Menentukan nilai df = N-k, Setelah diketahui nilai df maka dikonsultasikan dengan t tabel yang ada pada lampiran buku-buku statistik. Contoh df = 50 maka t(50) = 2,0086.

4. HASIL PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan laporan hasil penelitian, termasuk menjelaskan data riset dan deskripsi analisis yang merupakan jawaban secara empiris terhadap pertanyaan pada pokok masalah dan/atau hipotesis penelitian.

4.1. Sekilas Mengenai Data yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan data populasi atau *saturation sampling* pada satker pemerintah pusat di Indonesia, untuk mendapatkan data variabel pertumbuhan ekonomi, belanja barang, belanja operasional, dan inflasi. Tabel 2 menunjukkan ringkasan atas data yang dimaksud. Data terdiri dari data *time series* tahun 1990-2015 (26 tahun).

Tabel 2. Data variabel penelitian

Tahun	LnModal	LnOperasi	LnPDB	LnInf
1990	9.614938	9.682716	25.4632	2.055748
1991	9.834245	9.622649	25.57661	2.242424
1992	9.984837	9.741263	25.65858	2.018329
1993	10.03179	9.885273	25.7859	2.270866
1994	10.02234	9.958922	25.89881	2.14224
1995	9.97236	10.05629	26.03219	2.244114
1996	10.19977	10.27467	26.14984	2.075494
1997	10.23236	10.8511	26.09738	1.82936
1998	10.66333	11.44464	25.28182	4.067095
1999	9.834245	9.622649	25.66492	3.019894
2000	10.1587	11.93801	25.82934	1.31373
2001	10.63547	12.25005	25.80123	2.442529
2002	10.52742	12.06609	25.99965	2.474752
2003	11.14544	12.05498	26.18188	1.884904
2004	11.02598	12.30363	26.27171	1.831544
2005	10.40089	12.60852	26.3788	2.346789
2006	10.91422	12.7305	26.62199	2.573331
2007	11.07114	12.86313	26.79219	1.857461
2008	11.19509	13.24391	26.95812	2.27999
2009	11.23679	13.06531	27.01406	1.57143
2010	11.29336	13.16067	27.35011	1.635643
2011	11.67721	13.37114	27.51782	1.678497
2012	11.88521	13.49333	27.54532	1.453839
2013	12.1055	13.57544	27.53948	1.858387
2014	11.90055	13.68723	27.51503	1.855505
2015	12.28041	13.50707	27.48244	1.850519

Sumber: diolah dari Kementerian Keuangan, BPS, dan Worldbank (2016)

4.2. Statistik Deskriptif

Dari data *time series* selama 26 tahun (1990-2015), masing-masing nilai variabel dapat digambarkan secara ringkas dalam tabel statistik deskriptif. Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa dalam 26 tahun, rata-rata belanja modal pemerintah pusat adalah $e^{10,76}$ = 47098.67 miliar.

Tabel 3. Statstik Deskrptif

Descriptive Statistics

	N	Minim	Max	Mean	Std. Deviation
LnModal	26	9.615	12.280	10.76322	.775979
LnOperasi	26	9.623	13.687	11.80997	1.488784
LnPDB	26	25.282	27.545	26.40032	.742743
LnInf	26	1.314	4.067	2.11055	.548028
Valid N (listwise)	26				

Sumber: Output Aplikasi SPSS

Belanja operasi ternyata memiliki rata-rata lebih besar yaitu sebesar $e^{11,81}$ = 134591.56 miliar. Untuk mengetahui belanja mana yang lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, selanjutnya dilakukan pengujian mealui statistik inferensial.

4.3. Statistik Inferensial

4.3.1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) dapat digunakan untuk menguji normalitas residual. Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan melakukan pengujian hipotesis: H0 menyatakan bahwa data terdistribusi normal dan Ha menyatakan data tidak terdistribusi normal. Hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0.200 yang berarti berada di atas 0.05 sehingga H0 ditolak atau data penelitian disimpulkan berdistribusi normal.

Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		26
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.26307796
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.096
	Negative	-.132
Test Statistic		.132
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output Aplikasi SPSS

b) Uji Multikolinearitas

Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dilakukanlah Uji Multikolinearitas (Ghozali, 2013). Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana, setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* <0.10 atau sama dengan nilai VIF>10 (Ghozali, 2013). Berdasarkan output table 5 pengujian multikoliearitas, diperoleh angka VIF = 5.728, 5.727 1.136 dan ketiganya tidak lebih dari 10. Demikian pula nilai Tolerance = 0.175, 0.175, dan 0.880 danketiganya tidak kurang dari 0.10. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa multikolinearitas tidak terjadi.

c) Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), maka

dilakukan Uji Autokorelasi menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Menurut Ghozali (2013), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW test). Tidak ada autokorelasi jika nilai *Durbin-Watson* adalah sama atau lebih besar dari batas atas dan sama atau lebih rendah dari nilai empat dikurangi batas atas (dU ≤ DW ≤ 4-dU). Hal ini tidak bisa disimpulkan jika dL ≤ DW ≤ dU, atau 4-dU ≤ DW ≤ 4-dL. Ada autokorelasi positif jika 0 <DW <dL atau autokorelasi negatif jika 4-dL <DW <4.

Berdasarkan Gambar 3 *Durbin Watson* dengan n=26 dan k=variabel bebas=3, maka diperoleh dL= 1.1432 dan dU=1.6523. Karena nilai DW=1.451 maka tidak dapat disimpulkan mengenai keberadaan autokorelasinya.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	19.133	1.100		17.393	.000		
	LnModal	.692	.173	.723	3.999	.001	.175	5.728
	LnOperasi	.049	.090	.097	.539	.596	.175	5.727
	LnInf	-.356	.109	-.263	-3.268	.004	.880	1.136

a. Dependent Variable: LnPDB

Sumber: Output Aplikasi SPSS

Gambar 3. Uji Autokorelasi Durbin Watson

DW	Autocorr.(+)	No decision	No Autocorr.	No decision	Autocorr.(-)
	0	dL=1.1432	dU=1.6523	4-dU	4-dL
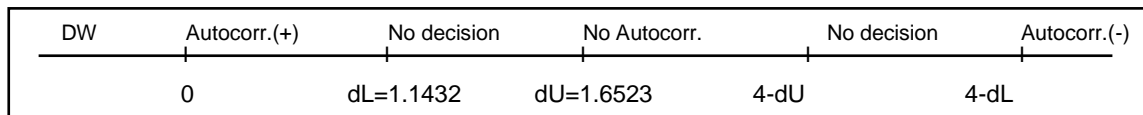
Sumber: Berdasarkan Ghozali (2013)

Tabel 6. DW Test Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.935[a]	.875	.857	.280442	1.451

a. Predictors: (Constant), LnInf, LnOperasi, LnModal
b. Dependent Variable: LnPDB

Sumber: Output Aplikasi SPSS

d) Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, dilakukan uji heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas, digunakan uji Glejser, yaitu dengan menguji tingkat signifikansi. Pengujian ini dilakukan dengan merespon variabel (x) sebagai variabel independen dengan nilai absolut *unstandardized* residual regresi sebagai variabel dependen. Apabila hasil uji di atas level signifikan (p > 0,05), berarti tidak terdapat heterokedastisitas, apabila dibawah level signifikan (p < 0,05). RES2 adalah hasil perhiungan absolut unstandarized residual. Setelah diregresikan antara X dan Y, diperoleh bahwa tingkat signifikansi = 0.249, 0.171, dan 0.346 dan ketiganya berada di atas 0.05 dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4. Metode Analisis Data

4.4.1. Model Regresi

Perhitungan analisa yang digunakan adalah analisa regresi berganda dengan menggunakan Aplikasi SPSS 23. Regresi linear untuk menghitung besarnya pengaruh variable X dan Y, yang diukur dengan menggunakan koefisien regresi untuk menghubungkan variabel dependen dengan variabel independen. Untuk membuktikan kebenaran adanya pengaruh variabel independen dan dependen digunakan analisis regresi.

Tabel 7. Uji Glejser dalam Rangka Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coeff. Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.474	.621		.763	.454
	LnModal	-.116	.098	-.569	-1.183	.249
	LnOperasi	.072	.051	.681	1.416	.171
	LnInf	.059	.062	.206	.963	.346

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Output Aplikasi SPSS

Tabel 8. Output regresi linear berganda

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	19.133	1.100		17.393	.000
	LnModal	.692	.173	.723	3.999	.001
	LnOperasi	.049	.090	.097	.539	.596
	LnInf	-.356	.109	-.263	-3.268	.004

a. Dependent Variable: LnPDB

Sumber: Output Aplikasi SPSS

Rumusan yang digunakan sebagai berikut:

LnPDB = a + b1 LnModal + b2 LnOperasi + b3 LnInf + e

Dimana:

LnPDB = logaritma natural atas Pertumbuhan PDB Riil.
a = konstanta
LnModal = logaritma natural atas belanja modal
LnOperasi = logaritma natural atas belanja operasi
E = error term
b1-3 = koefisien regresi

Analisis Regresi diolah dengan melakukan analisis regresi linier sederhana melalui program SPSS For Windows, dan diperoleh hasil sebagaimana pada Tabel 8. Berdasarkan Tabel tersebut, diperoleh koefisien regresi yaitu nilai konstanta (a) = 19.133; b1 = 0,692; b2 = 0,049, dan b3 = -0,356, sehingga model persamaan regresi adalah sebagai berikut:

LnPDB = 19.133 + 0,692LnModal +0,049 LnOperasi - 0,356 LnInf

4.4.2. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Namun variabel bebas yang melebihi dua maka nilai R2 yang dipakai adalah nilai Adjusted R2. Sebelumberbicara mengenai koefien determinasi (R2), peneliti juga mengamati koefisien korelasi (r). Menurut Sugiyono (2010) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 0,00-0,199 = sangat rendah; 0,20-0,399 = rendah; 0,40-0,599 = sedang; 0,60-0,799 = kuat; dan 0,80-1,000 = sangat kuat. Dari tabel output koefisien determinasi, dapat dilihat bahwa nilai korelasi (r) sebesar 0.935 yang berarti sangat kuat. tampak bahwa koefisien determinasi (Adjusted R2) = 0.857 atau 85.7%.

Nilai tersebut dapat diartikan bahwa sekitar 85.7% variasi variabel terikat dapat dijelaskan dan diprediksi oleh variabel-variabel bebas belanja modal dan belanja operasi. Sisa variasi variabel terikat sebesar 14.3% dijelaskan oleh variabel bebas lain. Oleh karena itu, para peneliti seharusnya lebih peduli mengenai relevansi antara variabel bebas dan variabel terikat secara teoritis dan logis.

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.935[a]	.875	.857	.280442	1.451

a. Predictors: (Constant), LnInf, LnOperasi, LnModal
b. Dependent Variable: LnPDB

Sumber: Output Aplikasi SPSS

4.4.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat atau tidak. Pengambilan keputusan ditolak dan diterimanya hipotesis nol (H0) sebagai berikut:

1) Jika F hitung > F tabel atau nilai Sig. < 0,05, maka H0 ditolak (ada pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat).

2) Jika F hitung < F tabel atau nilai Sig. > 0,05, maka H0 diterima/ gagal ditolak (tidak ada pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat).

Penentuan F tabel uji signifikansi 5%: a) Menentukan nilai df1 = k-1=4-1=3, dimana k adalah jumlah seluruh variabel; b) Menentukan df2 = 26-4 = 22, dimana N adalah jumlah sampel. Dari tabel statistik, diperoleh bahwa F tabel= 3.0491. Sesuai dengan hasil perhitungan berdasarkan tabel output uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 51.120 (> F tabel) atau signifikansi 0.000 < 0.05 sehingga H0 ditolak atau terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian hipotesis ini juga dapat dilakukan sesuai dengan grafik distribusi normal. Nilai F hitung berada pada daerah penolakan H0 karena lebih dari F tabel. Dengan demikian, H0 ditolak atau secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 9. Output Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.061	3	4.020	51.120	.000[b]
	Residual	1.730	22	.079		
	Total	13.792	25			

a. Dependent Variable: LnPDB
b. Predictors: (Constant), LnInf, LnOperasi, LnModal
Sumber: Output Aplikasi SPSS

Gambar 4. Uji F dengan Distribusi Normal

Indonesian Treasury Review Vol.2 No.1, 2017, Hal. 35-55

4.4.4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/ bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan ditolak dan diterimanya hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut:

1) Jika t hitung > t tabel atau nilai Sig. < 0,05, maka Ha diterima (ada pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat).
2) jika t hitung < t tabel atau nilai Sig. < 0,05, maka Ha ditolak (tidak ada pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat).

Penentuan t tabel dua sisi uji signifikansi 5%:

Karena pengaruh variabel bebas yang mungkin terjadi adalah positif atau negatif, maka pengujian dengan uji t dilakukan dengan cara 2 sisi. Dengan demikian, alfa dibagi menjadi 2 sisi, masing-masing 2,5% atau 0.025. Setelah itu, kemudian ditentukan nilai df = N-k=26-4=22. Setelah diketahui nilai df maka dikonsultasikan dengan t tabel yang ada pada lampiran buku-buku statistik. Dengan df = 22 maka t(22) = 2.4055. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t hitung yang dapat diperoleh dari tabel output regresi. Nilai t hitung adalah 3.999, 0.539, dan -3.268 berturut-turut untuk variabel LnModal, LnOperasi, dan LnInf. Dengan melihat batas kritis t tabel, maka dapat dilihat bahwa hanya LnModal dan LnInf yang berhasil menolak H0 yang berarti secara parsial variabel tersebut berpengaruh terhadap LnPDB.

Gambar 5. Distribusi Normal dalam Uji t
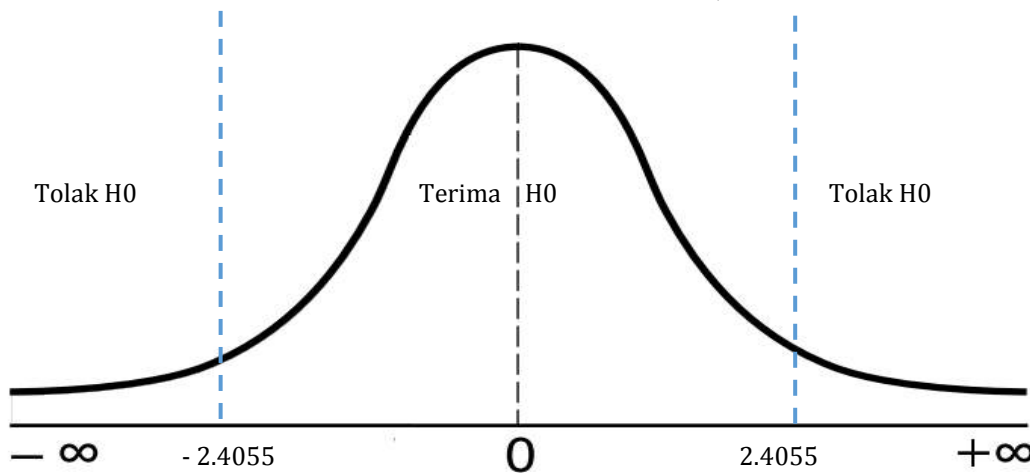
Dengan menggunakan batas kritis uji t, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan yang menguji pengaruh parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Terdapat pengaruh apabila t hitung berada pada daerah penolakan H0.

Tabel. Analisis Hasil Uji t

Grafik	Uraian dan Keputusan
− ∞ - 2.4055 0 2.4055 3.999 +∞	Variabel terikat: LnModal t hitung = 3.999, alpha = 0.001 < 0.05 Kesimpulan: H0 diolak (Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi).
− ∞ - 2.4055 0 0.539 2.4055 +∞	Variabel terikat: LnModal t hitung = 0.539, alpha = 0.596 > 0.05 Kesimpulan: H0 diterima (Belanja operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi).
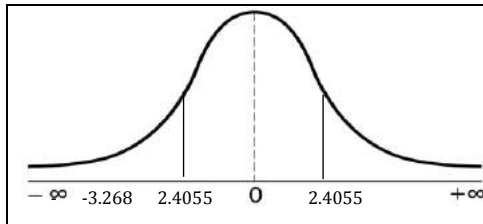
<table>
<tr>
<td></td>
<td>Variabel kontrol: LnInf
t hitung = 0.539, alpha = 0.004 < 0.05
Kesimpulan: H0 ditolak (Belanja operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi).</td>
</tr>
</table>

Sumber: diolah oleh penulis

4.5. Pembahasan Hasil

4.5.1. Hasil dari koefisien determinasi dan Uji F

Koefisien determinasi yang cukup besar yakni sebesar 0.857 atau 85.7% menunjukkan bahwa peranan dari variabel bebas dan kontrol terhadap variabel terikat sebesar 85.7%. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain di luar variabel penelitian yang diduga berpengaruh terhadap variabel terikat (pertumbuhan ekonomi). Hal ini dikuatkan dengan adanya hasil dari Uji F yang menyatakan bahwa secara keseluruhan model regresi yang dirancang dapat menjelaskan pengaruh belanja modal dan belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dikendalikan oleh inflasi.

4.5.2. Hasil dari Uji t

Uji t menunjukkan hasil bahwa belanja modal memiliki peranan yang lebih besar daripada belanja operasi di dalam meningatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti dengan hasil uji t yang menyimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan (alfa < 0.05) atau nilai t hitung berada di daerah penolakan H0. Berbeda dengan belanja operasi, hasil uji t menunjukkan bahwa meskipun koefisien korelasi bertanda positif, tetapi pengaruh dari koefisien ini tidak dapat diterima secara statistik dengan tingkat error yang ditoleransi sebesar 5%.

Kedua hasil uji t atas 2 variabel bebas, belanja modal dan belanja operasi, menunjukkan bahwa belanja modal sudah dikatakan efektif dan efisien sehingga dugaan yang dkhawatirkan oleh Devarajan, Swaroop, dan Zou (1996) tidak berlaku untuk negara berkembang Indonesia. Mereka beranggapan bahwa negara-negara berkembang menghabiskan terlalu banyak anggaran untuk belanja modal dan tidak cukup dana tersedia untuk belanja saat ini/ rutin. Sebagai negara berkembang, Indonesia mengelola belanja modal setiap tahun yang ternyata dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penelitian Easterly dan Rebelo (1993), Valadkhani (1998), Aschauer (1989), Bose, Haque, dan Osborn (2007), Turnovsky dan Fisher (1995), Butkiewic (2011), dan Parnawati (2010).

Berkaitan dengan masih belum tercapainya target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7%, maka solusi untuk terus melakukan pembenahan mulai dari kuantitas hingga kualitas belanja perlu terus dilakukan. Hal ini karena belanja modal terutama yang berkaitan dengan pengadaan infrastruktur, dapat menyokong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata. Penyebaran pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyebar sampai ke penjuru negeri. Meskipun koefisien belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi termasuk rendah, hal itu justru menjadi *milestone* bagi pemerintah pusat untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja modal. Rendahnya koefisien infrastruktur ini diutarakan oleh Direktur Indef Enny Sri Hartati yang mengatakan bahwa di Indonesia tambahan anggaran infrastruktur 1 persen PDB hanya mendorong 0,17 persen pertumbuhan ekonomi. Koefisien infrastruktur mengukur efek tambahan anggaran 1 persen PDB terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Tiongkok, setiap tambahan 1 persen anggaran infrastruktur terhadap PDB mampu mendorong 0,33 persen pertumbuhan ekonomi, sedangkan di India 0,21 persen (jpnn.com, 2016).

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,02% dapat lebih didorong dengan meningkatkan belanja modal. Belanja modal akan memberikan *multiplier effect.* Publikasi Ditjen Anggaran (2016) menjelaskan bahwa pengeluaran investasi ditujukan untuk pembentukan aset (stok barang modal/ *capital stock*) di masa depan yang diharapkan dapat menimbulkan *multiplier effect* yang besar dan lebih berkelanjutan. Di sisi lain, pengeluaran konsumsi ditujukan untuk membiayai operasional pemerintah yang bersifat rutin dan habis pakai atau dengan kata lain memiliki *multiplier effect* yang bersifat jangka pendek.

Pengeluaran investasi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi pengeluaran produktif bersifat langsung dan tidak langsung. Pengeluaran investasi produktif yang bersifat langsung, seperti pengadaan tanah dan pembelian barang/ peralatan fisik dapat meningkatkan stok barang modal (*capital stock*) secara fisik, dan meningkatkan output di masa-masa mendatang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang, yang disebut investasi "infrastruktur" ekonomi dan

sosial, seperti pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya. Sementara itu, salah satu contoh pengeluaran investasi produktif yang bersifat tidak langsung adalah investasi untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Investasi di bidang SDM diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan skala hasil produksi dan menciptakan pertumbuhan output yang berkesinambungan dalam jangka panjang (Ditjen Anggaran, 016). Pengeluaran produktif baik langsung maupun tidak langsung harus dapat direncanakan secara matang termasuk sumber pendanaannya agar tidak terjadi gagal bayar dan berhentinya proyek infrastruktur di pertengahan tahun anggaran.

Salah satu poin dalam Nawa Cita yakni pembangunan infrastruktur, hendaknya dapat dikawal secara baik dan didukung dengan pendanaan yang berkualitas, serta tidak menjadi saarang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penurunan peran belanja modal pertumbuhan ekonomi.

Salah satu catatan penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah adalah belanja operasi yang masih belum dapat berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengeluaran belanja barang, yang merupakan salah satu bagian di dalam belanja operasi, berupa pengadaan barang/ jasa, harus dilakukan secara hati-hati sedemikian rupa sehingga dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sebagai variabel kontrol, inflasi memiliki pengaruh signifikan dan negatif sesuai dengan dugaan yang diperkirakan oleh Barro (1996) yang menguji keterkaitan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data dari sekitar 100 negara. Penggunaan inflasi sebagai variabel kontrol sudah dilakukan secara tepat karena hubungan antara 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat sudah tidak mengandung unsur inflasi di dalamnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa ketidakkonsistenan hasil penelitian di berbagai negara, sulitnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, rendahnya belanja modal, mendorong penelitian ini dilakukan. Dengan menggunakan data *time series* selama 26 tahun mulai 1990 s.d. 2015 di Indonesia, penelitian ini membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini telah mempertimbangkan variabel kontrol berupa inflasi.

5.2. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian, pemerintah pusat hendaknya terus memperhatikan belanja modal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini juga berkenaan dengan masih belum tercapainya target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% hingga akhir tahun 2015. Diharapkan dengan perhatian yang serius, belanja tersebut dapat ditingkatkan karena ternyata belanja modal sebagai pembentuk pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan pemerataan dengan tetap berpegang pada prinsip pengadaan barang/ jasa dan prinsip lain yang relevan.

Lemahnya pengaruh belanja barang terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berarti pemerintah harus mengacuhkan belanja barang, tetapi justru sebaliknya, perbaikan harus terus dilakukan dengan sinergi yang tinggi agar belanja barang dianggarkan dan dikelola sedemikian rupa sehingga mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan masih banyak belanja barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan menyimpang dari tugas dan fungsi satuan kerja pengguna anggaran. Peranan pengawasan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) pada khususnya sebagai pembina keuangan negara di tingkat daerah, perlu ditingkatkan dengan cara yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh semua kalangan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, mulai dari variabel, hingga jangka waktu yang diambil sebagai data penelitian. Variabel yang diambil hanya berkontribusi sebesar 85.7% yang berarti masih terdapat kemungkinan variabel lain untuk masuk sebagai variabel penelitian. Selain itu, dengan jangka waktu yang lebih dari 26 tahun, hasil penelitian kemungkinan akan lebih akurat dan handal.

DAFTAR PUSTAKA (*REFERENCES*)

Adi, P. H. (2006). *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah.* Dalam Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.

Anasmen. (2009). *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat: 2000-2006*. Tesis. Depok: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

Arwati dan Hadiati. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Barat*. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013.

Aschauer, David A. (1989), Is Public Expenditure Productive? *Journal of Monetary Economics*.

Barro, R. J. (1996). Inflation and Growth. *Review*, 78.

Barro, Robert J. (1991), Economic Growth in a Cross Section of Countries, *Quarterly Journal of Economics.*

BPS. (2016). http://data.bps.go.id/

Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Boediono. (2010). *Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai Ekonomi, Edisi Ketiga*, Jakarta, KPG (Keputakaaan Populer Gramedia).

Bose, Niloy, Emranul Haque, and Denise R. Osborn (2007), *Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries,* Manchester School.

Butkiewicz, James L. and Halit Yanikkaya (2007), Time-Consistent Polities and Growth in Developing Countries: An Empirical Analysis, *Review of World Economics*.

Creswell, John W. (2003). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* - 2nd ed. India: Sage Publication.

Devarajan, Shantayanan, Vinaya Swaroop, and Heng-fu Zou (1996), The Composition of Public Expenditure and Economic Growth, *Journal of Monetary Economics*.

Direktorat Jenderal Anggaran. (2016). http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=908

Dhaliwal, D. S., Gaertner, F. B., Lee, H. S. G., and Trezevant, R. (2015). Historical Cost, Inflation, and the U.S. Corporate Tax Burden. *Journal of Accounting and Public Policy*, 34(5), 467–489. http://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2015.05.004.

Doessel, D. P., & Valadkhani, A. (1998). Economic Development and Institutional Factors Affecting Income Distribution: the Case of Iran, 1967-1993. *International Journal of Social Economics,* 25(2/3/4), 410-423.

Easterly, William and Sergio Rebelo. (1993). Fiscal Policy and Economic Growth: An empirical Investigation. *Journal of Monetary Economics.*

Ghozali, Imam (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Grier, Kevin B. and Gordon Tullock (1989). An Empirical Analysis of Cross-Section Economic Growth, 1951-1980. *Journal of Monetary Economics.*

Halim, A. (2008). *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik – Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Hansson, Par, and Magnus Henrekson (1994). A New Framework for Testing the Effect of Government Spending on Growth and Productivity. *Public Choice* 81: 381-401.

Iswardono (1997). Kebijakan Moneter di Indonesia (Indonesian Monetary Policy). *Journal of Economics,* FE UII, No. 2, Vol. 3, 1997.

Komisi Pemilihan Umum. (2014). http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf

Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. (2004). *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter.* Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Parnawati, Eka dan Sasana, Hadi. (2010). *Kausalitas Penerimaan, Belanja dan PDRB Kabupaten/ Kota di Indonesia.* Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN.

Republik Indonesia. (2006). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja*.

Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.*

Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The Impact of Financial Distress on Corporate Tax Avoidance Spanning the Global Financial Crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling,* 44, 44–53.

Samuelson, PA, dan Nordhaus WD (2004). *Ilmu Makroekonomi. Edisi Tujuh Belas, Diterjemahkan oleh Gretta, Theresa Tanoto, Bosco Carvallo, dan Anna Elly*. PT. Media Global Edukasi, Jakarta.

Schaltegger, Christoph A., and Benno Torgler. (2006). Growth Effects of Public Expenditure on the State and Local Level: Evidence from a Sample of Rich Governments*. Applied Economics.*

Sekaran, Uma. (2003). *Research Method for Business*. Fourth Edition. USA: John Wiley and Sons, Inc.

Setiyawati, Anis. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* [Online]. Tersedia: http://journal.ui.ac.id/index.php/jaki/article/view/2892 [06 September 2014]

Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi,* 1(2).

Turnovsky, Stephen J., and Walter H. Fisher. (1995). The Composition of Government Expenditures and Its Consequences for Macroeconomic Performance*. Journal of Economic Dynamics and Control.*

Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia.

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertasi Panduan Eviews*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Worldbank. 2016. http://data.worldbank.org/